

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

## ◆ Pemprov DKI Kordinasi dengan Kemen ART/BPR

**JAKARTA (Poskota)** - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui masih adanya lahan yang belum bisa dibebaskan untuk proyek normalisasi Ciliwung. Menurutnya, pembebasan lahan itu masih terkendala masalah status kepemilikan tanah.

"Masih ada beberapa area-area yang belum dibebaskan karena status tanahnya," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2).

Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR). Bahkan, Heru men-

ilai Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sudah menyatakan diri siap membantu DKI menyelesaikan masalah ini.

"Sosialisasi sudah kami lakukan, pendataan sudah, termasuk pendataan luas lahan sudah semuanya. Tinggal status tanah itu seperti apa, itu kan haknya BPN. Setelah selesai ditetapkan, kami bayar hak-haknya," sambungnya.

Sebagai informasi, tahun ini Pemprov DKI berencana membebaskan lahan seluas 6,5 hektare yang ada di empat kelurahan, yaitu di Kelurahan Cililitan, Cawang, Kampung Melayu, dan Rawajati.

Rinciannya, pembebasan lahan di Kelurahan Cililitan seluas 0,8 hektare, Rawajati 1,5 hektare, Cawang 2,25 hektare, dan Kampung Melayu 1,95 hektare. Anggaran Rp469 miliar pun sudah dialokasikan dari APBD 2023 untuk pembebasan lahan.

Setelah pembebasan lahan rampung, barulah pekerjaan konstruksi normalisasi dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Total pekerjaan konstruksi dan pembangunan tanggul (sheet pile) yang akan dikerjakan ialah 4,3 kilometer. (\*/lfn)